

# PERWILAYAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS KARET (*Hevea Brasiliensis*) DI INDONESIA

Andi Pratama Pasaribu<sup>1</sup>, Soetriono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Alumnus Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember  
Jln. Kalimantan no. 37 Kampus Tegalboto - Jember 68121

## ABSTRACT

*Natural rubber is a estate commodity that give the second biggest devisen in Indonesia after palm oil and 85% of its exertion is done by small farmer. This research has aim to analyse production trend of rubber production and also to map base and non base region of rubber production then. It is continued by analysing region economic effect that happened in rubber exertion in the region to regional analysis and for national economic. This research shows that production trend of rubber in Indonesia tends to increase. Beside that, production based region is in Central Kalimantan, South Kalimantan, Jambi, West Kalimantan and South Sumatra. The exertion model is not concentrated in one region but there is none that specialize it self to rubber exertion. Analysis result shows that rubber commodity support plantation activity in Indonesia and also gives added value directly for the base region growth. To optimalize the growth and development needs to conduct development strategy that is integrated.*

*Key words: Production trend, base and non base region*

## PENDAHULUAN

Karet merupakan komoditas ekspor yang mampu memberikan kontribusi didalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor karet Indonesia selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1,0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1,3 juta ton pada tahun 1995 dan 2,0 juta ton pada tahun 2005. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada semester pertama tahun 2006 mencapai US\$ 2,0 milyar, dan diperkirakan nilai ekspor karet pada tahun 2006 akan mencapai US \$ 4,2 milyar (Kompas, 2006).

Luas lahan tanaman karet yang dimiliki Indonesia mencapai 2,7 – 3 juta hektar. Areal perkebunan karet yang dimiliki Indonesia merupakan yang terluas dibandingkan perkebunan karet Malaysia dan Thailand. Namun sayangnya luas areal itu tidak diimbangi dengan produktivitas yang memuaskan. Produktivitas lahan karet di Indonesia rata-rata rendah dan mutu karet yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Bahkan, di pasaran internasional karet Indonesia terkenal sebagai karet bermutu rendah. Hal ini berbeda dengan produktivitas yang dihasilkan oleh kedua negara tetangga tersebut. Tulisan ini

bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak pengusahaan karet domestik terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

## METODE PENELITIAN

Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan sengaja di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan Nasional, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan instansi-instansi terkait. Adapun penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2007 hingga Maret 2008. Data yang digunakan antara rentang waktu tahun 1990-2006.

Analisis data dilakukan dengan analisis trend produksi dengan metode kuadrat terkecil, formulasinya sebagai berikut (Hasan, 2002) :

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = data berkala atau nilai trend untuk periode tertentu

X = periode waktu (tahun)

a = konstanta, nilai Y jika X = 0

b = indeks X, kemiringan garis trend (*slope*)

Kriteria pengambilan keputusan:

- Indeks trend (+); trend produksi komoditas karet cenderung meningkat.
- Indeks trend (-); trend produksi komoditas karet cenderung menurun.

Penentuan wilayah basis dan non basis, menggunakan analisis *Location Quotient* dengan formulasi (Wibowo dan Januar, 1998):

$$LQ_s = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

keterangan:

$LQ_s$  = *Location Quotient* komoditas karet di suatu wilayah

$v_i$  = produksi karet di Provinsi i (ton)

$v_t$  = produksi karet Indonesia (ton)

$V_i$  = total produksi tanaman perkebunan di Provinsi i (ton)

$V_t$  = total produksi tanaman perkebunan Indonesia (ton)

Kriteria pengambilan keputusan:

$LQ_s < 1$  ; wilayah i bukan wilayah basis produksi komoditas karet

$LQ_s > 1$  ; wilayah i merupakan wilayah basis produksi komoditas karet

$LQ_s = 1$  ; wilayah i merupakan wilayah basis produksi komoditas karet tetapi hanya cukup untuk kebutuhan wilayah sendiri.

Asumsi yang digunakan adalah :

1. Pola permintaan penduduk bersifat homogen artinya setiap penduduk di wilayah penelitian dianggap mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional.
2. Produksi wilayah tersebut pertama-tama digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri dan selebihnya di ekspor ke luar wilayah tersebut.

Analisis karakteristik penyebaran (pengusahaan) komoditas karet di Indonesia dilakukan dengan analisis lokalita dan spesialisasi (Soetrisno, 1996) :

**Lokalita:**

$$L_p = \left\{ \left( \frac{S_i}{N_i} \right) - \left( \frac{\sum S_i}{\sum N_i} \right) \right\}$$

$$\alpha = L_p (+)$$

keterangan:

$L_p$  = lokalita

$\alpha$  = indeks lokalita

$S_i$  = Produksi karet di Provinsi i (ton)

$N_i$  = Produksi karet di Indonesia (ton)

$\sum S_i$  = Total produksi tanaman perkebunan di Provinsi i (ton)

$\sum N_i$  = Total produksi tanaman perkebunan di Indonesia (ton)

Kriteria pengambilan keputusan:

$\alpha \geq 1$  ; usaha perkebunan karet terkonsentrasi pada suatu wilayah

$\alpha < 1$  ; usaha perkebunan karet tersebar di beberapa wilayah

**Spesialisasi:**

$$S_p = \left\{ \left( \frac{S_i}{\sum S_i} \right) - \left( \frac{N_i}{\sum N_i} \right) \right\}$$

$$\beta = S_p (+)$$

keterangan:

$S_p$  = spesialisasi

$\beta$  = indeks spesialisasi

$S_i$  = Produksi karet di Provinsi i (ton)

$N_i$  = Produksi karet di Indonesia (ton)

$\sum S_i$  = Total produksi tanaman perkebunan di Provinsi i (ton)

$\sum N_i$  = Total produksi tanaman perkebunan di Indonesia (ton)

Kriteria pengambilan keputusan:

$\beta \geq 1$  ; suatu wilayah menspesialisasikan pada satu jenis usaha perkebunan karet

$\beta < 1$  ; suatu wilayah tidak menspesialisasikan pada satu jenis usaha perkebunan karet.

Selanjutnya, untuk mengenai peranan suatu komoditas sebagai sektor basis dalam mendukung kegiatan perkebunan di Indonesia menggunakan analisis *Basic Service Ratio* dan *Regional Multiplier* dengan formulasi (Budiharsono, 2005), yaitu:

$$BSR = \frac{\sum \text{sektorbasis}}{\sum \text{sektor nonbasis}}$$

$$RM = \frac{\sum \text{sektor basis} + \sum \text{sektor non basis}}{\sum \text{sektor basis}}$$

Keterangan :

$\sum$  sektor basis = jumlah produksi karet pada sektor basis (ton)

$\sum$  sektor non basis = jumlah produksi karet pada sektor non basis (ton)

BSR = Basic Service Ratio

RM = Regional Multiplier

Kriteria pengambilan keputusan:

BSR, RM > 1, sektor basis mendukung kegiatan perkebunan di Indonesia

BSR, RM ≤ 1, sektor basis tidak mendukung kegiatan perkebunan di Indonesia

Selanjutnya, untuk melihat nilai pengganda jangka pendek dan jangka panjang digunakan analisis *Short Multiplier* (MS) dan *Long Multiplier* (ML):

$$MS = \frac{YB + YN}{YB}$$

Dimana:

MS = Pengganda jangka pendek

YB = Penerimaan basis

YN = Penerimaan non basis

Serta pengganda jangka panjang:

$$ML = \frac{1}{1 - \frac{YN + YI - MI}{YN + YB}}$$

Dimana:

ML = Pengganda jangka panjang

YB = Penerimaan non basis

YN = Penerimaan basis

YI = Pendapatan lokal yang

diinvestasikan dalam barang-barang modal

MI = Pengeluaran lokal untuk impor

barang-barang investasi

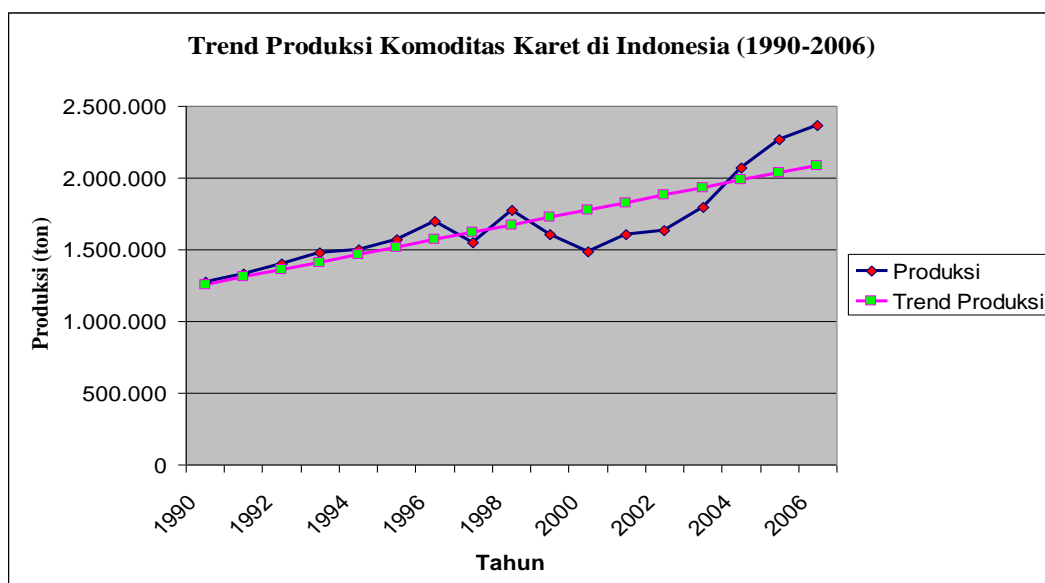
Asumsi yang digunakan adalah :

1. Pola permintaan penduduk bersifat homogen artinya setiap penduduk di wilayah penelitian dianggap mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional
2. Respon hubungan sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis (time lag) diabaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Trend Berdasarkan Indikator Produksi

Berdasarkan data produksi komoditas perkebunan di Indonesia, khususnya pada komoditas karet antara tahun 1990-2006 telah terjadi fluktuasi produksi karet nasional. Secara runtut dapat diperhatikan pada gambar berikut di bawah ini.



Gambar 1. Trend Produksi Komoditas Karet di Indonesia Tahun 1990-2006

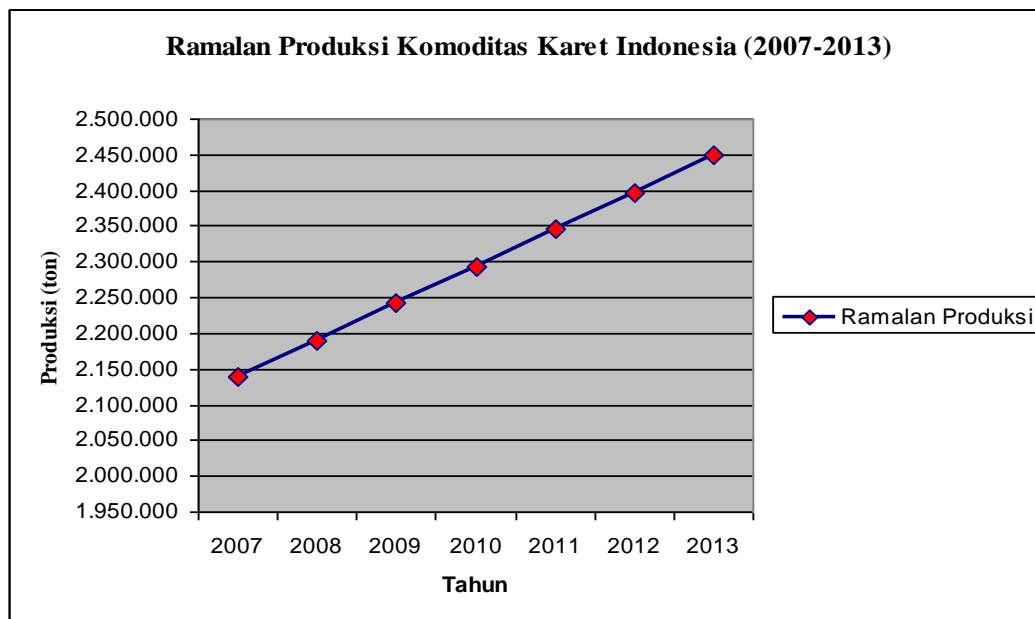
Melalui analisis trend dengan metode kuadrat terkecil (*least square method*) diperoleh persamaan garis trend produksi yaitu  $Y = 1.670.883 + 51.919X$ . Angka 1.670.883 merupakan nilai intersep produksi karet. Angka ini mengandung pengertian bahwa nilai rata-rata produksi karet selama 17 tahun terakhir ini ialah sebesar 1.670.883 ton. Sementara itu angka +51.919 ialah nilai indeks trend yang berarti bahwa terjadi peningkatan rata-rata produksi tanaman karet sebesar 51.919 ton/tahun selama rentang tahun 1990-2006.

Indeks trend yang bernilai positif menunjukkan bahwa kecenderungan produksi karet nasional secara umum mengalami peningkatan pada tahun ke tahun. Kecenderungan peningkatan produksi tersebut sesuai dengan hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa produksi karet di Indonesia cenderung meningkat. Ramalan produksi tanaman karet dimasa yang akan datang disajikan dalam tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Ramalan Produksi Tanaman Karet di Indonesia tahun 2007-2013

Tahun	X	Ramalan Produksi (ton)
2007	9	2.138.153,01
2008	10	2.190.071,90
2009	11	2.241.990,79
2010	12	2.293.909,68
2011	13	2.345.828,57
2012	14	2.397.747,46
2013	15	2.449.666,35

Sumber: Lampiran 1 diolah



Gambar 2. Ramalan Produksi Komoditas Karet Indonesia (2007-2013)

Data di atas dapat menunjukkan bahwa ramalan produksi tanaman karet senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

#### Analisis Sektor Basis dan Non Basis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tentang wilayah basis maupun

non basis komoditas karet di Indonesia ialah analisis Location Quotient (LQ). Berdasarkan analisis LQ pada provinsi di Indonesia dengan menggunakan indikator produksi diperoleh hasil analisis berupa beberapa wilayah basis komoditas karet sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai LQ Wilayah Basis Komoditas Karet Berdasarkan Indikator Produksi

No	Provinsi	Tahun																
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Jambi	3,74	3,79	4,06	4,86	3,00	3,09	4,41	2,75	2,42	2,18	1,95	1,71	1,69	1,80	1,78	1,71	1,74
2	Sumsel	3,24	3,38	3,76	3,27	3,00	2,72	2,38	3,09	2,52	2,36	2,22	2,12	2,07	2,38	2,17	1,94	2,11
3	Kalbar	3,55	3,62	3,61	3,79	3,71	3,05	2,79	2,68	2,22	2,20	2,10	2,18	2,25	1,82	2,25	1,92	1,76
4	Kalteng	5,37	5,54	5,33	5,37	5,80	5,26	3,98	4,70	4,18	2,34	3,38	3,41	3,30	3,02	2,03	1,37	1,41
5	Kalsel	2,76	2,77	2,76	3,00	3,36	3,06	1,39	3,26	3,23	3,45	2,75	2,39	2,07	2,25	1,94	3,03	3,01

Sumber: Data Ditjenbun diolah

Data di atas menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan LQ atas dasar indikator produksi tanaman karet diketahui bahwa terdapat lima provinsi yang merupakan daerah basis produksi tanaman karet. Berturut-turut dari yang terbesar ialah Provinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Kelima provinsi tersebut secara konstan memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu ( $LQ \geq 1$ ). Oleh sebab itu, kelima provinsi tersebut dikatakan merupakan wilayah basis produksi tanaman karet. Lebih lanjut dari tabel LQ wilayah basis di atas dapat pula disimpulkan pula bahwa kelima provinsi tersebut merupakan provinsi utama penghasil komoditas karet di Indonesia. Masing-masing provinsi dari tahun-ketahun memiliki nilai LQ yang selalu  $\geq 1$  (bahkan tidak terdapat nilai  $LQ = 1$ ). Hal ini menginterpretasikan bahwa masing-masing provinsi tersebut memiliki surplus produksi yang berpeluang untuk dijual ke luar daerah baik dalam bentuk perdagangan antar provinsi hingga perdagangan luar negeri (ekspor). Melalui hasil ekspor tersebut, provinsi basis akan mendapatkan surplus finansial yang selanjutnya dapat dikonversi ke dalam bentuk sumber daya lain yang dibutuhkan provinsi itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis basis dan non basis di atas, faktor-faktor yang diduga merupakan pendukung suatu wilayah menjadi wilayah basis antara lain ialah kesesuaian kondisi tanah, iklim dan cuaca di wilayah tersebut dengan usaha budidaya tanaman karet. Kesesuaian tersebut akan

mendukung tanaman untuk dapat berproduksi secara maksimal. Faktor kedua ialah keengganan masyarakat untuk mengalihgunakan lahannya untuk budidaya tanaman lain. Secara tipologis petani Indonesia merupakan petani yang masih cenderung tradisional dan secara konstan melanjutkan tradisi terdahulu, sehingga dengan sendirinya akan mengusahakan komoditas yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut.

Faktor penghambat yang diduga menjadi penghambat wilayah tersebut menjadi wilayah basis disamping kesesuaian tanah, iklim dan cuaca serta pola tradisional ialah konsentrasi tanaman perkebunan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, wilayah Sumatera Utara selain merupakan penghasil komoditas karet juga merupakan wilayah penghasil komoditas kelapa sawit yang cukup besar. Akibatnya, hal tersebut memecah konsentrasi wilayah tersebut dalam memproduksi satu komoditas secara konstan.

### Analisis Lokalisasi (Lp) dan Spesialisasi (Sp)

Analisis lokalisasi merujuk pada selisih antara perbandingan produksi karet di suatu provinsi dan produksi karet di Indonesia dengan perbandingan antara produksi tanaman perkebunan di suatu provinsi dan produksi tanaman perkebunan di Indonesia. Hasilnya akan berupa deretan indeks yang menunjukkan apakah tanaman karet terkonsentrasi di suatu wilayah atau malah menyebar di berbagai daerah.

Tabel 3. Rangkuman Indeks Analisis Lokalisasi Komoditas Karet (*Hevea brasiliensis*) di Indonesia Berdasarkan Indikator Produksi Tahun 1990-2006

No	Provinsi	Tahun																
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	NAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>	0,00	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sumatera Utara	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
3	Sumatera Barat	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Riau	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	0,00	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
6	Jambi	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
7	Sumatera Selatan	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,13</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
8	Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bengkulu	0,00	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	0,00	0,00	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	0,00	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00
10	Lampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Banten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jawa Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DI. Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jawa Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kalimantan Barat	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
21	Kalimantan Tengah	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
22	Kalimantan Selatan	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
23	Kalimantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sulawesi Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sulawesi Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Maluku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Irian Jaya Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data Ditjenbun diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tidak terdapat Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks lokalisasi  $\geq 1$ . Artinya, bahwa usaha perkebunan karet di Indonesia tidak terkonsentrasi di satu wilayah melainkan menyebar di beberapa wilayah. Fakta ini menginterpretasikan bahwa komoditas karet menyebar di hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan komoditas karet di Indonesia memperhatikan kesesuaian kondisi tanah, iklim dan topografi.

#### **Analisis Spesialisasi (Sp)**

Hasil analisis spesialisasi dengan menggunakan indikator produksi menunjukkan bahwa tidak terdapat wilayah

atau provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks spesialisasi  $\geq 1$  (mengarah pada azas spesialisasi). Hal ini menginterpretasikan bahwa tidak terdapat provinsi di Indonesia yang menspesialisasikan provinsinya pada perusahaan komoditas karet. Fakta bahwa tidak terdapat provinsi yang menspesialisasikan pada perusahaan komoditas karet ini menjelaskan bahwa di masing-masing provinsi terdapat keragaman komoditas yang diusahakan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Tabel 4. Rangkuman Indeks Analisis Spesialisasi Komoditas Karet (*Hevea brasiliensis*) di Indonesia Berdasarkan Indikator Produksi Tahun 1990-2006

No	Provinsi	Tahun																
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.03</b>	0.00	<b>0.04</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
3	Sumatera Barat	<b>0.10</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	<b>0.07</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.34</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
6	Jambi	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.40</b>	<b>0.51</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.41</b>	<b>0.21</b>	<b>0.19</b>	<b>0.14</b>	<b>0.10</b>	<b>0.07</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
7	Sumatera Selatan	<b>0.31</b>	<b>0.32</b>	<b>0.36</b>	<b>0.30</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	<b>0.17</b>	<b>0.25</b>	<b>0.21</b>	<b>0.16</b>	<b>0.12</b>	<b>0.11</b>	<b>0.10</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.10</b>	<b>0.12</b>
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>	<b>0.11</b>	<b>0.13</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.02</b>	<b>0.06</b>	<b>0.05</b>	<b>0.04</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.05</b>	<b>0.07</b>	<b>0.02</b>	0.00	<b>0.01</b>
10	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Jawa Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.01</b>	0.00	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>	0.00	0.00	<b>0.01</b>	0.00
13	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.03</b>	0.00	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>
14	Jawa Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	DI. Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jawa Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.20</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Nusa Tenggara Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Nusa Tenggara Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Barat	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.34</b>	<b>0.37</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.22</b>	<b>0.20</b>	<b>0.16</b>	<b>0.14</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.08</b>	<b>0.13</b>	<b>0.10</b>	<b>0.08</b>
21	Kalimantan Tengah	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	<b>0.36</b>	<b>0.45</b>	<b>0.43</b>	<b>0.15</b>	<b>0.24</b>	<b>0.23</b>	<b>0.21</b>	<b>0.19</b>	<b>0.11</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
22	Kalimantan Selatan	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.23</b>	<b>0.26</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.05</b>	<b>0.27</b>	<b>0.30</b>	<b>0.28</b>	<b>0.18</b>	<b>0.13</b>	<b>0.10</b>	<b>0.12</b>	<b>0.10</b>	<b>0.22</b>	<b>0.21</b>
23	Kalimantan Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	0.00	0.00	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	0.00	0.00	<b>0.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Irian Jaya Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Data Ditjenbun diolah



## Analisis Basic Service Ratio (BSR) dan Regional Multiplier (RM)

Tabel 5. Indeks Basic Service Ratio (BSR) Komoditas Karet (*Hevea brasiliensis*) di Indonesia Berdasarkan Indikator Produksi Tahun 1990-2006

Tahun	BSR
1990	0,87
1991	0,86
1992	0,88
1993	0,86
1994	0,93
1995	0,91
1996	0,81
1997	1,10
1998	0,94
1999	1,03
2000	0,90
2001	0,87
2002	0,86
2003	0,95
2004	1,08
2005	1,10
2006	1,10
Rata-rata	0,94

Sumber: Data Ditbun diolah (2007)

Besarnya nilai indeks BSR menunjukkan seberapa besar pula kenaikan yang akan diterima oleh wilayah basis bila terjadi kenaikan produksi tanaman perkebunan. Seperti telah kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan adalah merupakan wilayah basis tanaman karet di Indonesia. Sebagai contoh, diperoleh nilai indeks BSR sebesar 1,10 pada tahun 2006 yang menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan produksi sebesar 1 ton pada sektor

perkebunan maka akan meningkatkan produksi sebesar 1,10 ton pada sektor basis.

Analisis Regional Multiplier (RM) merupakan analisis lanjutan dari Basic Service Ratio (BSR). Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara sektor basis dan penambahannya terhadap satu sektor ke sektor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Penambahan ini akan memberikan efek berantai terhadap sektor lainnya, walaupun pengaruhnya tidak selalu bersifat searah dan dengan besaran yang sama. Hasil analisisnya sebagai berikut.

Tabel 6. Indeks Regional Multiplier (RM) Komoditas Karet (*Hevea brasiliensis*) di Indonesia Berdasarkan Indikator Produksi Tahun 1990-2006

Tahun	RM
1990	2,15
1991	2,17
1992	2,13
1993	2,16
1994	2,08
1995	2,10
1996	2,23
1997	1,91
1998	2,06
1999	1,97
2000	2,11
2001	2,15
2002	2,16
2003	2,05
2004	1,92
2005	1,91
2006	1,91
<b>Rata-rata</b>	<b>2,07</b>

Sumber: Data Ditbun diolah (2007)

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai RM >1. Sebagai contoh, nilai indeks sebesar 1,91 pada tahun 2006 menginterpretasikan bahwa setiap peningkatan produksi sektor basis sebesar 1 ton maka akan meningkatkan produksi sektor non basis sebesar 1,91 ton. Semakin besar angka pengganda regional (Regional Multiplier) yang dihasilkan maka semakin besar pula kemungkinan pertumbuhan wilayah yang ditimbulkan oleh sektor kegiatan basis.

#### Analisis Pengganda Pendapatan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Tabel 7. Perhitungan Multiplier Jangka Pendek (MS) Komoditas Karet di Indonesia Tahun 2002-2006

Tahun	Penerimaan Wilayah	Penerimaan Sektor Basis (Juta)	Penerimaan Sektor Non Basis (Juta)	MS
2002	24,354,151,728	16,569,144,480	7,785,007,248	1.47
2003	16,150,847,828	11,257,622,520	4,893,225,308	1.43
2004	20,673,897,183	14,450,684,924	6,223,212,259	1.43
2005	33,972,529,360	23,798,338,080	10,174,191,280	1.43
2006	43,397,788,044	30,400,907,114	12,996,880,930	1.43

Sumber: Lampiran 92

Nilai indeks pengganda jangka pendek (MS) dari komoditas kelapa antara tahun 2002-2006 bersifat fluktuatif. Tahun 2002 nilai penggandanya sebesar 1,47 kemudian

Berdasarkan konsep ekonomi basis, laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat terjadi karena adanya efek multiplier (pengganda) pendapatan sektor basis terhadap pendapatan wilayah secara keseluruhan. Mekanisme multiplier (pengganda) tersebut bekerja melalui aktivitas pembelanjaan kembali dari setiap komponen pendapatan dari sektor basis yang diperoleh dari transaksi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian di suatu wilayah (Soetrisno, 1998).

mengalami penurunan menjadi 1,43 di tahun 2003 yang selanjutnya konstan hingga tahun 2006.

Besaran indeks pengganda jangka pendek (MS) ini dapat diinterpretasikan sebagai tingkat penerimaan yang diperoleh oleh wilayah basis atas setiap rupiah pendapatan komoditas karet. Sebagai contoh pada tahun 2002, setiap Rp. 1,- pendapatan yang diterima dari komoditas karet maka akan memberikan pengganda sebesar Rp. 1,47,- terhadap pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2003, dengan setiap Rp. 1,- pendapatan yang diterima dari komoditas karet maka akan memberikan pengganda sebesar Rp. 1,43,- terhadap pendapatan daerah. Menilik hasil analisis pengganda jangka pendek di atas, maka untuk meningkatkan indeks pengganda jangka pendek perlu dilakukan beberapa hal

yaitu; (1) menjaga stabilitas harga komoditas karet yang diimbangi dengan stabilitas produksi sehingga secara otomatis akan menjaga stabilitas penerimaan petani karet; (2) menciptakan kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menanamkan usaha di sektor komoditas karet, serta; (3) penyesuaian pajak hasil komoditas karet sehingga akan merangsang pertumbuhan investasi.

Analisis pengganda jangka panjang yang dilakukan sejak tahun 2002-2006 dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat sepenuhnya digunakan untuk investasi ditemukan nilai pengganda sebagai berikut:

Tabel 8. Perhitungan Multiplier Jangka Panjang (ML) Komoditas Karet di Indonesia Tahun 2002-2006

Tahun	Penerimaan Sektor Basis	Penerimaan Sektor Non Basis	Investasi Lokal Barang Modal	Pengeluaran Lokal	Pengganda Jangka Panjang
2002	16.569.144.480	7.785.007.248	430.379.000.000	242.030.000.000	-7,05
2003	11.257.622.520	4.893.225.308	467.539.000.000	165.790.000.000	-17,99
2004	14.450.684.924	6.223.212.259	515.906.000.000	184.500.000.000	-15,33
2005	23.798.338.080	10.174.191.280	57.730.000.000	433.870.000.000	11,77
2006	30.400.907.114	12.996.880.930	601.851.200.000	725.991.000.000	3,56

Sumber: Lampiran 93

Berbeda dengan analisis pengganda jangka pendek, dalam analisis pengganda jangka panjang ditemukan nilai negatif (-). Dapat diartikan bahwa investasi yang dikeluarkan pada satu tahun tertentu belum dapat langsung dikembalikan ditahun berikutnya. Sebagai gambaran, pengganda investasi pada tahun 2002 senilai -7,05. Artinya, jika menginvestasikan sejumlah Rp. 1,- maka akan mengalami kerugian sebesar Rp. -7,05,-. Namun demikian, pada tahun 2005 ditemukan nilai investasi senilai 11,77. Artinya jika mengeluarkan investasi sebesar Rp.1,- maka akan menerima perolehan sebesar Rp. 11,77,-. Hal ini cenderung wajar karena dalam perhitungan analisis penggandanya menggunakan komponen nilai penerimaan sektor perkebunan yang fluktuatif.

### Strategi Pengembangan Komoditas Karet

Penelitian ini berupaya mengarahkan strategi pengembangan komoditas karet di Indonesia mengacu pada kondisi

perwilayahan dan analisis lingkungan strategis komoditas karet. Melalui pola yang terintegrasi, diharapkan akan tercapai pertumbuhan yang optimal bagi pengembangan komoditas karet di Indonesia. Selanjutnya, optimalisasi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak (trigger) bagi pembangunan wilayah di Indonesia.

Kondisi lingkungan strategis komoditas karet di Indonesia cenderung memiliki potensi besar yang masih belum teroptimalkan. Permintaan pasar dunia terhadap produksi karet alam masih belum berbanding dengan hasil produksi karet alam dunia. Oleh karena itu, diperkirakan hingga 5-10 tahun mendatang harga karet alam masih akan terus meningkat. Walaupun pada saat yang lain juga terjadi peningkatan produksi karet sintetis sebagai substitusi karet alam namun hal tersebut tampaknya tidak akan berpengaruh terlalu signifikan terhadap pangsa pasar karet alam. Adanya resistansi sebagian konsumen terhadap karet

sintetis serta gencarnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara produsen karet alam terhadap produksi karet sintetis setidaknya akan mengontrol produksi karet sintetis itu sendiri. Serapan pasar dunia terhadap potensi karet alam yang tinggi mengakibatkan permintaan atas produk ini bersifat elastis.

Rhomdon (2003) menyimpulkan bahwa disetiap daerah perkebunan selalu terdapat tiga pelaku usaha perkebunan. Ketiganya terdiri atas petani rakyat, korporasi swasta dan pemerintah. Meskipun selalu unggul dalam luas lahan pengusahaan, namun petani rakyat cenderung selalu kalah dari segi produktivitas. Disamping itu, pola tataniaga yang kompleks seringkali menjadi pemicu kurang maksimalnya penerimaan yang diperoleh oleh petani. Pelaku sistem tataniaga komoditas perkebunan antara lain ialah petani, pengusaha/pabrik, pedagang, eksportir dan lembaga lelang. Banyaknya pelaku tataniaga ini mengakibatkan margin pemasaran yang semakin tidak efisien. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan trend fluktuasi penerimaan petani rakyat diperlukan suatu upaya bersama yang terintegrasi melibatkan petani karet (baik perorangan maupun perusahaan), pemerintah serta pengusaha perkaretan secara bersama-sama mengoptimalkan peluang yang ada dan meminimalisir hambatan yang ada. Beberapa bentuk kerjasama terintegrasi yang diperlukan untuk membenahi subsektor tanaman karet di Indonesia antara lain:

#### 1. Agribisnis hulu

Pada dasarnya, pemerintah telah berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan petani akan bibit unggul melalui pembangunan Balai Penelitian Karet terdapat tiga Balai Penelitian Karet di Indonesia yaitu Balit Sungei Putih di Medan, Balit Sembawa di Palembang dan Balit Getas di Solo serta Pusat penelitian tanaman perkebunan di Bogor. Pada kenyataannya akses yang dilakukan petani atas Balit tersebut masih relatif rendah. Proses sosialisasi balai penelitian karet kepada petani mutlak dilakukan. Selain mampu menyediakan paket budidaya yang baik, balai penelitian juga diharapkan turun secara langsung dalam membimbing petani

berkaitan dengan hal-hal teknis terkait proses adopsi inovasi bagi petani. Tentunya, hal ini tak terlepas pula dengan upaya memasyarakatkan adopsi inovasi yang terjangkau oleh petani kecil sekalipun.

Hasil analisis perwilayahan komoditas karet menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan merupakan daerah sebaran komoditas karet dengan nilai produksi yang tinggi. Namun ketiadaan balai penelitian karet di daerah sebaran komoditas merupakan suatu kelemahan yang perlu diperbaiki. Mengingat potensi pasar komoditas karet yang perlu dioptimalkan, maka pengadaan balai penelitian perlu mendapat dukungan penuh.

#### 2. Agribisnis Hilir

Kebutuhan akan infrastruktur yang tepat guna serta memadai merupakan salah satu arah pengembangan yang penting bagi terciptanya optimalisasi produktivitas komoditas karet. Pengusahaan karet oleh petani rakyat pada kenyataannya memang merupakan salah satu penghambat proses adopsi teknologi dikalangan petani. Hal ini bisa diminimalisir dengan kerjasama kemitraan yang bisa dibangun antara petani dengan pengusaha (investor) dengan pengawasan dari pemerintah. Diharapkan, pemerintah sebagai regulator dapat memudahkan pengusaha untuk meningkatkan investasi pada sektor tanaman karet. Mengacu pada nilai angka pengganda penerimaan jangka pendek yang cukup besar (rata-rata 1,43), investasi subsektor karet akan memiliki nilai *payback period* yang relatif pendek.

Infrastruktur lainnya yang disarankan perlu diperbaiki ialah sektor transportasi, pergudangan serta akses pasar. Dengan sistem transportasi yang memadai diharapkan akan mampu memotong rantai pemasaran dari petani hingga ke pabrik sehingga mampu meminimalkan margin pemasaran yang diterima oleh petani. Dengan model kerjasama yang terintegrasi dengan baik seperti ini diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya juga akan memperoleh hasil yang diharapkan. Petani mampu meningkatkan produksi sehingga juga berpotensi meningkatkan penerimaan, pengusaha memperoleh volume bahan baku yang diharapkan sehingga mampu mengoptimalkan kapasitas produksi dan kebutuhan pasar dan pemerintah

memperoleh *share* devisa yang semakin besar.

### 3. Kebijakan

Sesuai dengan konsep perekonomian nasional Indonesia, maka pada dasarnya pemerintah merupakan pemegang instrumen kebijakan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, peran pemerintah lebih bersifat sebagai perencana (*plan maker*), pelayan (*civil servant*) dan pengawas (*control instrument*). Pemerintah merencanakan arah pertumbuhan perekonomian nasional, membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh perekonomian dalam hal ini ialah sarana prasarana yang memadai sehingga senantiasa mampu membangkitkan dan mendorong perekonomian itu sendiri. Selanjutnya, dalam fungsinya sebagai pengawas maka pemerintah juga perlu mengatur sistem perekonomian agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan melakukan kontrol terhadap kebijakan yang ditetapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Komoditas karet menunjukkan trend peningkatan produksi dari tahun 1990-2006. Trend peningkatan produksi dimasa yang akan datang 2007-2013 juga menunjukkan kecenderungan peningkatan.
  2. Daerah basis komoditas karet terletak pada:
    - a. Daerah basis produksi karet ialah Provinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.
    - b. Daerah basis penerimaan karet ialah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Banten dan Sumatera Utara.
    - c. Daerah basis luas lahan karet ialah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara.
  3. Analisis lokalisasi dan spesialisasi menunjukkan bahwa usaha perkebunan karet tidak terkonsentrasi dan terspesialisasi pada satu wilayah.
4. Komoditas karet mampu mendukung sektor perkebunan di Indonesia, terlihat dari nilai fluktuasi Basic Service Ratio (BSR) yang cenderung mengalami peningkatan. Indeks Regional Multiplier (RM) juga cenderung fluktuatif namun senantiasa berada  $>1$ . Kondisi ini menggambarkan bahwa kegiatan perekonomian pada sektor basis mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
  5. Strategi pengembangan daerah basis di Indonesia perlu diarahkan pada tiga subsistem yaitu agribisnis hulu dengan memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah melalui balai penelitian sebagai akses petani atas informasi. Subsistem kedua yaitu agribisnis hilir dengan membenahi infrastruktur yang ada dan terakhir dengan menerapkan kebijakan yang bersifat mendorong iklim usaha komoditas karet nasional.

### Saran

1. Luas lahan pengusahaan karet masih sangat potensial namun kurang didukung oleh subsistem usahatani yang baik, akibatnya produksi dan penerimaan kurang maksimal. Intensifikasi pertanian mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas produksi dan memaksimalkan penerimaan.
2. Pengembangan subsektor tanaman karet di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan strategi yang terintegrasi dalam rangkaian kerjasama aktif dari semua pihak baik petani, pengusaha serta pemerintah untuk mengisi permintaan pasar atas karet alam. Pemerintah perlu menggalakkan kembali program-program intensifikasi subsektor tanaman karet melalui pendirian balai penelitian di daerah sehingga mampu membantu petani dalam mengakses informasi serta mengadopsi teknologi tanpa mengabaikan kondisi spesifik lokalita serta permodalan.
3. Petani perlu terus memperbaharui teknik-teknik budidaya dan pengolahan tanaman karet yang cenderung tradisional dengan teknik-teknik baru yang lebih efektif dan efisien. Pengusaha karet hendaknya dapat membantu melalui proses kemitraan

dengan petani sehingga dapat membantu petani dari segi permodalan dan akses informasi pasar

Wibowo, R dan Jani Januar. 1998. *Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisa Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Glasson, J. 1977. *An Introduction to Regional Planning*. (Terjemahan: Paul Sitohang). London: Hutchinson of London.

Januar, J. 2005. *Konsep dan Teori Analisis Wilayah*. Jember: Universitas Jember.

Kompas. 2006. Kinerja Ekspor Capai Rekor. *Kompas* edisi Rabu, 2 Agustus 2006.

Rhomdon, M. M. 2003. Tinjauan Sistem Pengelolaan Agribisnis Perkebunan (kasus di Sumatera Selatan). *Jurnal Penelitian UNIB*. Vol. IX. November 2003

Soetrisno. 1996. Sektor Basis Kedelai sebagai Pendukung Agroindustri di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. *Agrijurnal* Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nomor 2 Volume 3. Jember

\_\_\_\_\_. 1998. Dampak Produksi Kelapa Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah Di Daerah Tingkat II Sumenep. *Laporan Penelitian*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Wibowo, R. 1999. Seri Perencanaan Pembangunan Pertanian Perencanaan, *Pemantauan dan Evaluasi Program Proyek Pembangunan Pertanian*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.